



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1999

Handwritten signature
9/4/99

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG

PENBUKAAN DAN PENGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan dayaampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan pengerian sekolah tahun pelajaran 1997/1998;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1993;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1997/1998.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Memugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi untuk melaksanakan pembukaan dan pengeringan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada rata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. TK Negeri 212 buah;
 2. SLB Negeri 37 buah;
 3. SLTP Negeri 10.375 buah;
 4. SML Negeri 2.795 buah;
 5. SMK Negeri 762 buah;
- yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ud.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

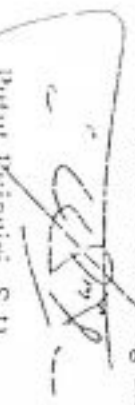
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : ...

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pemerintahan dan Penguasaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan,
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Sekretaris Inspektoriat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,
Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan.


Potut Pefogiri, S.H.
NIP. 131661278

REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0016/O/1999 TANGGAL 5 JANUARI 1999

NO.	PROVINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENERANGAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
1.	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	JAWA BARAT	4	-	54	6	-	65	-	-	-	2	-	2	67
3.	JAWA TENGAH	4	-	56	5	-	65	-	-	-	-	-	-	65
4.	D.I. YOGYAKARTA	1	-	2	1	-	4	-	-	-	-	-	-	4
5.	JAWA TIMUR	5	-	82	6	-	93	-	-	-	-	-	-	93
6.	D.I. ACEH	1	-	19	3	-	23	-	-	-	2	-	4	27
7.	SUMATERA UTARA	3	-	23	7	-	33	-	-	-	-	-	-	33
8.	SUMATERA BARAT	1	-	14	2	-	17	-	-	-	1	-	1	18
9.	RIAU	2	-	9	2	-	13	-	-	-	-	-	-	13
10.	JAMBI	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-	11
11.	SUMATERA SELATAN	2	-	40	2	1	45	-	-	-	-	-	-	45
12.	LAMPUNG	1	-	31	2	-	34	-	-	-	-	-	-	34
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	25	2	-	28	-	-	-	-	-	-	28
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	-	27	4	-	32	-	-	-	-	-	-	32
15.	KALIMANTAN SELATAN	2	-	8	2	-	12	-	-	-	-	-	-	12
16.	KALIMANTAN TIMUR	2	-	3	1	-	6	-	-	-	-	-	-	6
17.	SULAWESI UTARA	1	-	9	1	-	11	-	-	-	-	-	-	11
18.	SULAWESI TENGAH	-	-	4	1	-	5	-	-	-	-	-	-	5
19.	SULAWESI SELATAN	4	-	20	4	-	28	-	-	-	-	-	-	28
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	14	1	-	16	-	-	-	-	-	-	16
21.	MALUKU	2	-	15	1	-	18	-	-	-	-	-	-	18
22.	BALI	1	-	6	1	1	9	-	-	2	5	-	7	25
23.	NUSA TENGGARA BARAT	2	-	9	2	-	13	-	-	1	-	-	1	10
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	28	2	-	31	-	-	-	-	-	-	31
25.	IRIAN JAYA	-	-	11	1	1	13	-	-	-	-	-	-	13
26.	BENGKULU	-	-	8	-	-	9	-	-	-	-	-	-	9
27.	TIMOR TIMUR	1	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3
JUMLAH		44	1	527	62	3	637	-	-	6	10	-	16	653

1	2	3	4	5	6	7
2. JAWA BARAT						
A. PEMBUKAAN						
1. TK Negeri Cirebon	-			Harjamukti	Kotamadia Cirebon	11.1.1.4236.23.01.02.51.0 11.1.1.4236.23.01.02.5120 11.1.1.4236.23.01.02.5150
2. TK Negeri Sukabumi	-			Baros	Kotamadia Sukabumi	11.1.1.4236.23.01.02.5210 11.1.1.4236.23.01.02.5220 11.1.1.4236.23.01.02.5230 11.1.1.4236.23.01.02.5250 11.1.1.4236.23.01.02.5350
3. TK Negeri Majalengka	-			Sukahaji	Kabupaten Majalengka	
4. TK Negeri Tigaraksa	-			Tigaraksa	Kabupaten Tangerang	
5. SLB Negeri Subang	-			Subang	Kabupaten Subang	11.1.4.4298.23.01.02.5110 11.1.4.4298.23.01.02.5120 11.1.4.4298.23.01.02.5150 11.1.4.4298.23.01.02.5210 11.1.4.4298.23.01.02.5220 11.1.4.4298.23.01.02.5230 11.1.4.4298.23.01.02.5250 11.1.4.4298.23.01.02.5350
6. SLTP Negeri 1 Kemang	-			Kemang	Kabupaten Bogor	11.1.1.4242.23.01.02.5110 11.1.1.4242.23.01.02.5120 11.1.1.4242.23.01.02.5150
7. SLTP Negeri 2 Gunung Sindur	-			Gunung Sindur	Kabupaten Bogor	11.1.1.4242.23.01.02.5210 11.1.1.4242.23.01.02.5220 11.1.1.4242.23.01.02.5230 11.1.1.4242.23.01.02.5250 11.1.1.4242.23.01.02.5350
8. SLTP Negeri 2 Leuwiliang	-			Leuwiliang	Kabupaten Bogor	
9. SLTP Negeri 2 Rumpin	-			Rumpin	Kabupaten Bogor	
10. SLTP Negeri 2 Bojong Soang	-			Bojong Soang	Kabupaten Bandung	

1	2	3	4	5	6	7
		11. SLTP Negeri 2 Ciwaringin	-	Ciwaringin	Kabupaten Cirebon	
		12. SLTP Negeri 2 Susukan	-	Susukan	Kabupaten Cirebon	
		13. SLTP Negeri 5 Banjarsari	-	Banjarsari	Kabupaten Ciamis	
		14. SLTP Negeri 2 Sukadana	-	Sukadana	Kabupaten Ciamis	
		15. SLTP Negeri 6 Padaherang	-	Padaherang	Kabupaten Ciamis	
		16. SLTP Negeri 4 Pangandaran	-	Pangandaran	Kabupaten Ciamis	
		17. SLTP Negeri 3 Haurgeulis	-	Haurgeulis	Kabupaten Indramayu	
		18. SLTP Negeri 2 Losarang	-	Losarang	Kabupaten Indramayu	
		19. SLTP Negeri 2 Lemahabang	-	Lemahabang	Kabupaten Karawang	
		20. SLTP Negeri 1 Tempuran	-	Tempuran	Kabupaten Karawang	
		21. SLTP Negeri 3 Ciamaya	-	Ciamaya	Kabupaten Karawang	
		22. SLTP Negeri 4 Ciawi Gebang	-	Ciawi Gebang	Kabupaten Kuningan	
		23. SLTP Negeri 3 Kadugode	-	Kadugode	Kabupaten Kuningan	

1	2	3	4	5	6	7
		24. SLTP Negeri 3 Mandirancan	-	Mandirancan	Kabupaten Kuningan	
		25. SLTP Negeri 4 Mandirancan	-	Mandirancan	Kabupaten Kuningan	
		26. SLTP Negeri 4 Cilimus	-	Cilimus	Kabupaten Kuningan	
		27. SLTP Negeri 3 Bayah	-	Bayah	Kabupaten Lebak	
		28. SLTP Negeri 3 Malimping	-	Malimping	Kabupaten Lebak	
		29. SLTP Negeri 3 Maja	-	Maja	Kabupaten Lebak	
		30. SLTP Negeri 3 Banjarsari	-	Banjarsari	Kabupaten Lebak	
		31. SLTP Negeri 4 Dawuan	-	Dawuan	Kabupaten Majalengka	
		32. SLTP Negeri 4 Maja	-	Maja	Kabupaten Majalengka	
		33. SLTP Negeri 2 Palasah	-	Palasah	Kabupaten Majalengka	
		34. SLTP Negeri 5 Rajagaluh	-	Rajagaluh	Kabupaten Majalengka	
		35. SLTP Negeri 3 Cimanuk	-	Cimanuk	Kabupaten Pandeglang	
		36. SLTP Negeri 3 Pagelaran	-	Pagelaran	Kabupaten Pandeglang	

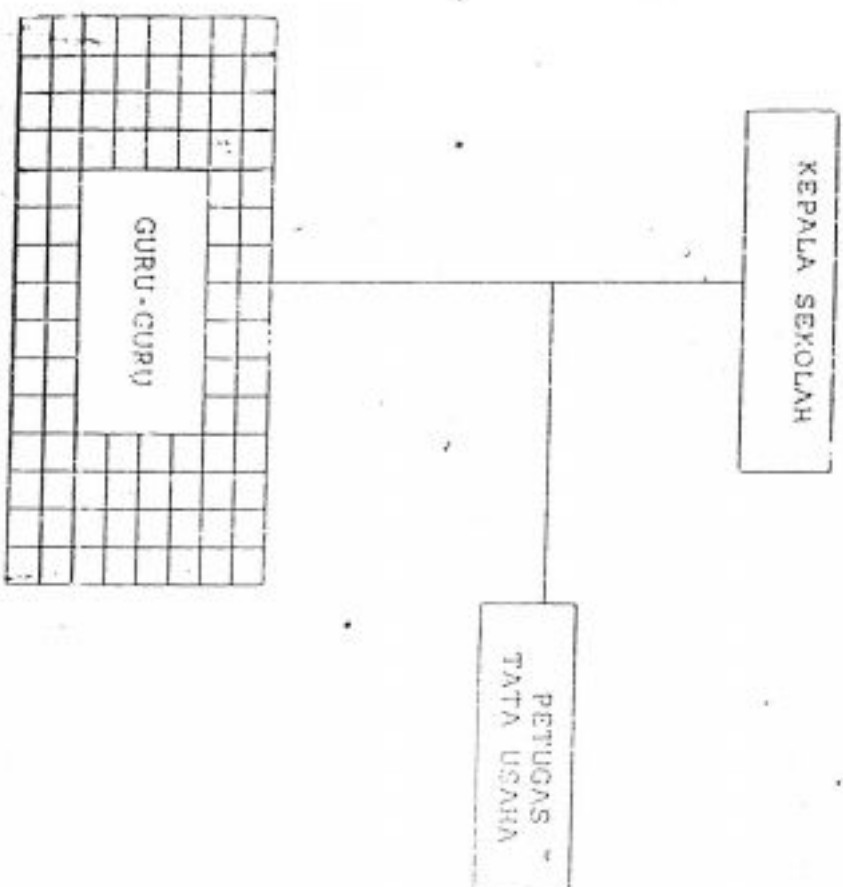
1	2	3	4	5	6	7
		37. SLTP Negeri 3 Wanayasa	-	Wanayasa	Kabupaten Purwakarta	
		38. SLTP Negeri 3 Darangdan	-	Darangdan	Kabupaten Purwakarta	
		39. SLTP Negeri 4 Campaka	-	Campaka	Kabupaten Purwakarta	
		40. SLTP Negeri 8 Cilegon	-	Cibeber	Kota Administrasi Cilegon	
		41. SLTP Negeri 2 Cikeusal	-	Cikeusal	Kabupaten Serang	
		42. SLTP Negeri 2 Carengang	-	Carengang	Kabupaten Serang	
		43. SLTP Negeri 2 Walantaka	-	Walantaka	Kabupaten Serang	
		44. SLTP Negeri 2 Baros	-	Baros	Kabupaten Serang	
		45. SLTP Negeri 3 Surade	-	Surade	Kabupaten Sukabumi	
		46. SLTP Negeri 3 Warung Kiara	-	Warung Kiara	Kabupaten Sukabumi	
		47. SLTP Negeri 3 Ciracap	-	Ciracap	Kabupaten Sukabumi	
		48. SLTP Negeri 4 Pelabuhan Ratu	-	Pelabuhan Ratu	Kabupaten Sukabumi	
		49. SLTP Negeri 2 Cikidang	-	Cikidang	Kabupaten Sukabumi	

1	2	3	4	5	6	7
		52. DITP Negeri 2 Surabaya Tengah	-	Jampang Tengah	Kabupaten Sukabumi	
		53. DITP Negeri 3 Surabaya	-	Pabuaran	Kabupaten Subang	
		54. DITP Negeri 2 Surabaya	-	Cisalak	Kabupaten Subang	
		55. DITP Negeri 2 Cijambe	-	Cijambe	Kabupaten Subang	
		56. DITP Negeri 2 Patek Beusi	-	Patek Beusi	Kabupaten Subang	
		57. DITP Negeri 3 Kawatu	-	Kawatu	Kabupaten Tasikmalaya	
		58. DITP Negeri 3 Cisayong	-	Cisayong	Kabupaten Tasikmalaya	
		59. DITP Negeri 4 Salopa	-	Salopa	Kabupaten Tasikmalaya	
		60. DITP Negeri 4 Balara	-	Balara	Kabupaten Tangerang	
		61. DITP Negeri 2 Rapiq	-	Rapiq	Kabupaten Tangerang	

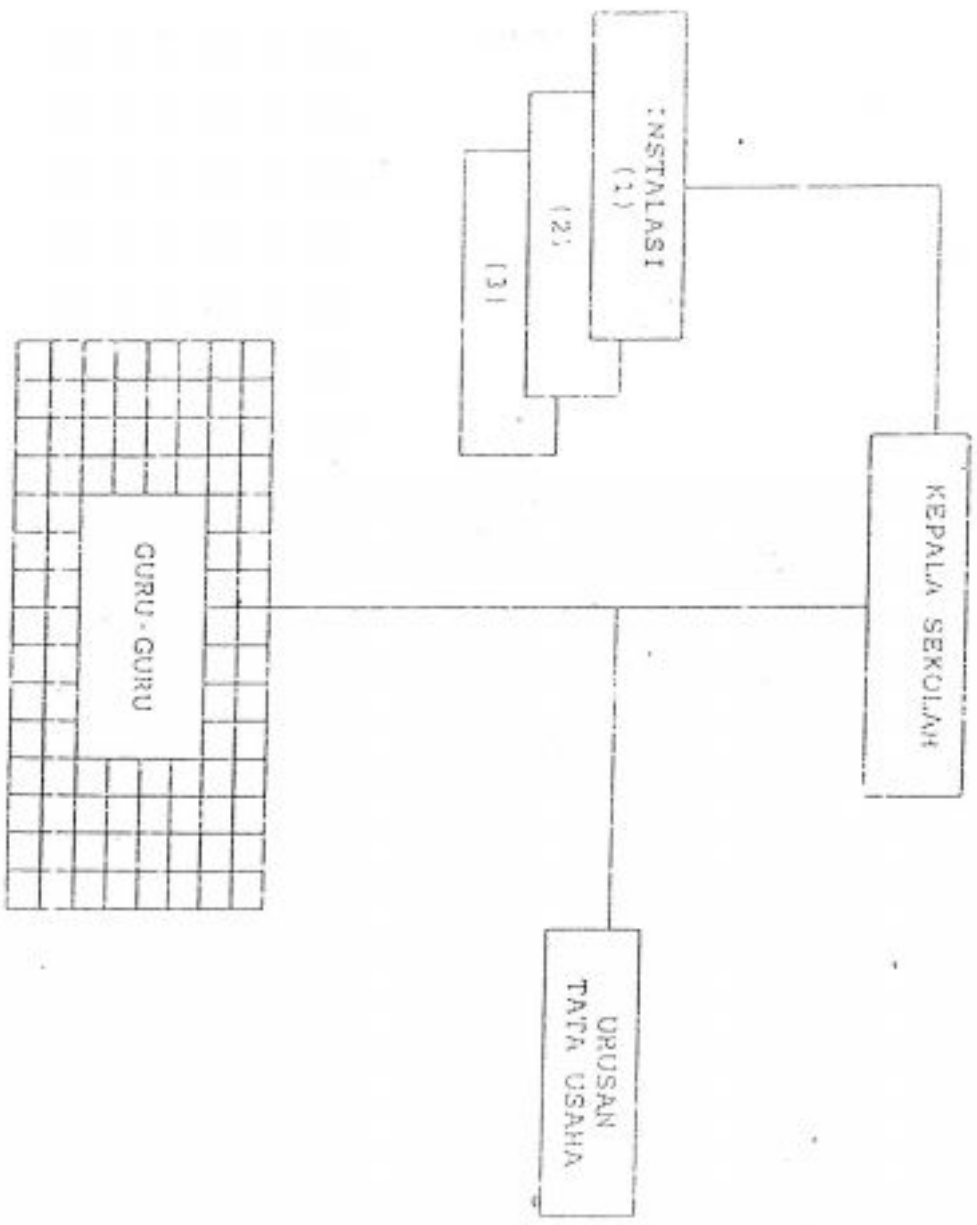
3	4	5	6	7
60. SMU Negeri 20 Bandung	-	Cibiru	Kotamadya Bandung	11.1.2.4201.23.01.02.5110 11.1.2.4201.23.01.02.5120 11.1.2.4201.23.01.02.5130 11.1.2.4201.23.01.02.5140 11.1.2.4201.23.01.02.5150
61. SMU Negeri 9 Cirebon	-	Harjamukti	Kotamadya Cirebon	11.1.2.4201.23.01.02.5220 11.1.2.4201.23.01.02.5230 11.1.2.4201.23.01.02.5240 11.1.2.4201.23.01.02.5250
62. SMU Negeri 1 Haurgeulis	-	Haurgeulis	Kabupaten Indramayu	11.1.2.4201.23.01.02.5350
63. SMU Negeri 1 Sukahaji	-	Sukahaji	Kabupaten Majalengka	
64. SMU Negeri 1 Jampang Tengah	-	Jampang Tengah	Kabupaten Sukabumi	
65. SMU Negeri 1 Cieoka	-	Cieoka	Kabupaten Tangerang	
1. SMU Negeri 1 Ciledug	SMU Swasta Pemda Ciledug	Ciledug	Kabupaten Cirebon	11.1.2.4201.23.01.02.5110 11.1.2.4201.23.01.02.5120 11.1.2.4201.23.01.02.5130 11.1.2.4201.23.01.02.5140 11.1.2.4201.23.01.02.5150
2. SMU Negeri 4 Ciamis	SMU Swasta Galuh Ciamis	Ciamis	Kabupaten Ciamis	11.1.2.4201.23.01.02.5220 11.1.2.4201.23.01.02.5230 11.1.2.4201.23.01.02.5240 11.1.2.4201.23.01.02.5250 11.1.2.4201.23.01.02.5350

SALINAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 001a/O/1999 TANGGAL 5 JANUARI 1999

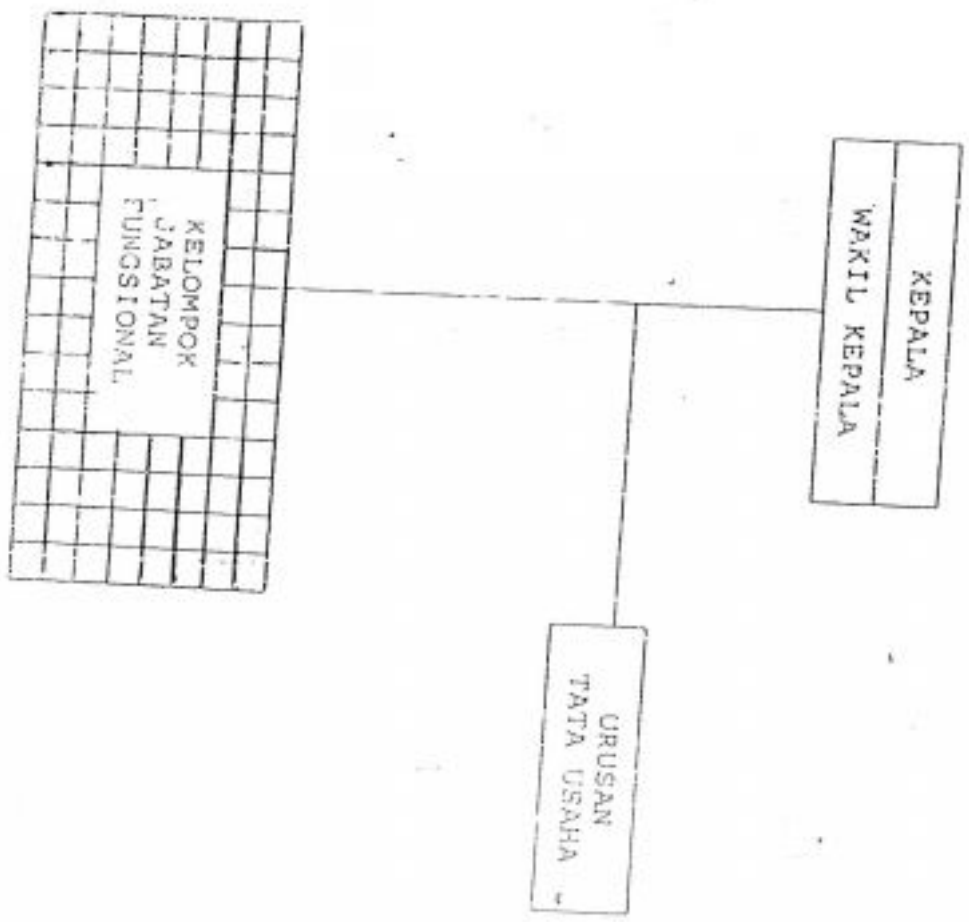
BAGAN ORGANISASI
TAMAN KANAK-KANAK



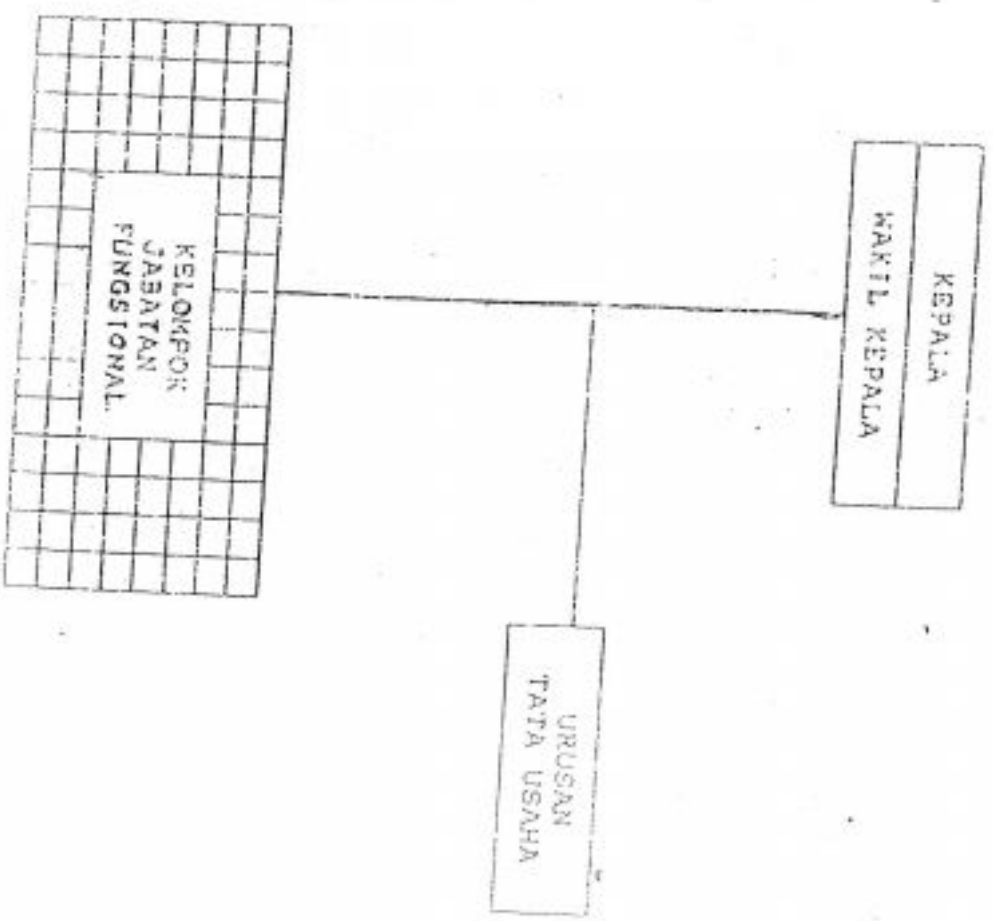
1. BAGIAN ORGANISASI
SEKOLAH LUAR BIASA



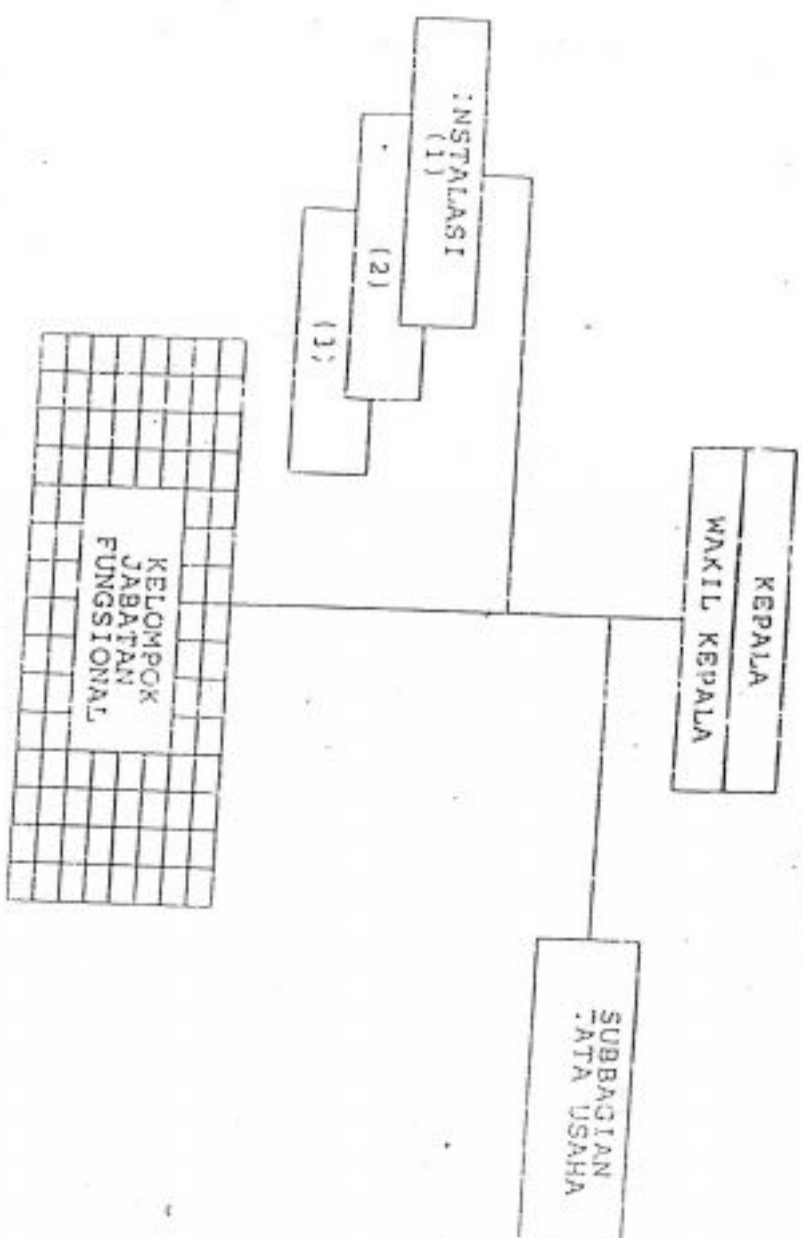
C. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA



D BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM



E. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEURUAN



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
id

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
A. H. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,
Kepala Sub Bagian Pengendalian
Peraturan Perundang-undangan.

Putut Pujiyetti, S.H.
NIP. 131661278